



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jl. Jend. Sudirman No. 01 RT. 04 Kel. Melayu Telp (0541) 661158 Kode Pos 75512

Website : disperindag.kukarkab.go.id Email : disperindag@mail.kukarkab.go.id

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Allah Azza Wazalla karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari menyelesaikan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA Perangkat Daerah) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ke 4 (empat) dari Rencana Strategis yang telah disusun dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun. Melalui Rencana Kerja ini diharapkan sasaran dan tujuan kinerja Organisasi Perangkat Daerah dinas dapat terlihat sehingga nantinya dapat dilakukan evaluasi dan review terhadap pelaksanaan yang telah dilakukan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) tersebut yang merupakan suatu dokumen perencanaan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memuat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun sehingga pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dapat dilihat melalui evaluasi dan review agar tahun berikutnya akan menjadi lebih baik lagi.

Semoga Rencana Kerja yang disusun ini nantinya dapat bermanfaat bagi Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perindustrian Dan Perdagangan serta masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara ke depannya.

Tenggarong, 05 Agustus 2024
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab.
Kutai Kartanegara
Plt.Kepala



Sayid Fathullah, S.Sos. M.M
NIP. 19740217 199703 2 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I.....	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1. LATAR BELAKANG	4
1.2. LANDASAN HUKUM	5
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II	8
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU	8
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD	8
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	27
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH.....	30
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD/RENSTRA PERANGKAT DAERAH.....	Error! Bookmark not defined.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	72
BAB III	74
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	74
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	74
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	74
BAB IV	76
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	76
4.1. PROGRAM DAN KEGIATAN	Error! Bookmark not defined.
BAB V	110
PENUTUP.....	110
5.1. CATATAN DALAM PENYUSUNAN RENJA.....	110
5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN	111
5.3. RENCANA TINDAK LANJUT	112

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)	12
Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara.....	31
Tabel T-C.31 Review terhadap Renstra PD/Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	53
Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara	74
Tabel 3.1. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.....	79
Tabel T- C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya mutlak untuk dikembangkan sehubungan pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang terus berkembang sehingga perkembangan kota, kecamatan maupun kelurahan/desa harus mampu menyediakan sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat. Perkembangan tersebut harus dapat dicermati oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang nantinya akan mempunyai peranan penting dalam memajukan daerah.

Perkembangan yang diharapkan dan harus terus maju tersebut tidaklah lepas dari rencana-rencana penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh para aparatur. Oleh sebab itu maka secara berkesinambungan perencanaan yang dibuat dan disusun tidak boleh lepas dari rencana pembangunan secara nasional, propinsi maupun kabupaten/kota.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus berkembang dalam upaya pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga rencana pembangunan tersebut harus dibuat dan disusun dalam rencana kerja dari program dan kegiatan yang terukur. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun oleh Pemerintah Daerah diharapkan nantinya dapat dijadikan pedoman dan arah pelaksanaan pembangunan yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Melalui Rencana Kerja yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang harus dilakukan dinas selaku unsur pelaksanaan dan penyelenggaraan terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 serta implementasinya setiap tahun sehingga evaluasi dalam pelaksanaannya.

Rencana Kerja yang telah disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dituangkan kedalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah tersebut akan berfungsi sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam membangun daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dengan memperhatikan Rencana Kerja tersebut maka rencana kerja tahun sebelumnya akan dapat dievaluasi terhadap penyelenggaraan tujuan dan sasaran, sehingga program dan kegiatan tahun selanjutnya dapat dipahami dengan berpedoman pada Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP).

Pelaksanaan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dalam tahun berjalan harus dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kinerja guna mengetahui sampai sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah selaku penyusun Rencana Kerja yang selanjutnya disusun dalam bentuk laporan kinerja yang lebih dikenal Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, yang meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang Perindustrian dan Perdagangan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah selaku Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2019- 2024 dengan visi **“Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”**. Tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap penjabaran dari Rencana Kerja 2021 - 2026 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021 sedangkan Tahun 2025 merupakan tahun keempat bagi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Rencana Kerja yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan sehingga dapat dianggarkan dalam Rencana Anggaran dan Pendapat Belanja Daerah (RAPBD) tahun selanjutnya.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pasar Tradisional;
16. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
19. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 adalah selaras dengan maksud dan tujuan Rencana Strategis yaitu adanya penyediaan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang berisi :

- a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara.
- c) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun tujuan penyusunan agar dapat menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan dalam :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKJIP).

c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran.

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan. e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN,
	1.1 Latar Belakang
	1.2 Landasan Hukum
	1.3 Maksud dan Tujuan
	1.4 Sistematika Penulisan.
BAB II	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan sasaran OPD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	4.1 Program dan Kegiatan.
BAB V	PENUTUP.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan serta mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara pendanaannya bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2023: **Rp. 48.098.053.858,00**

Terbagi untuk Sepuluh (10) Program yaitu : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 28.013.504.170,00 terealisasi sebesar Rp. 23.075.218.292,00, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dengan anggaran sebesar Rp. 15.260.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.239.824.161,00, Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dengan anggaran sebesar Rp. 3.250.000.000,00, terealisasi sebesar Rp. 2.025.246.509,00, . Program Pengembangan Ekspor dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.085.045.580,00, Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan anggaran sebesar Rp. 625.390.000,00, terealisasi sebesar Rp. 570.911.270,00, Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri dengan anggaran sebesar Rp. 657.375.000,00 terealisasi sebesar Rp. 585.418.510,00 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri dengan anggaran sebesar Rp. 9.460.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.589.144.914,00 Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan anggaran sebesar Rp. 187.796.000,00 terealisasi sebesar Rp. 127.382.000,00, Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan dengan Anggaran Sebesar Rp. 250.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 176.298.448,00, Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan Anggaran Sebesar Rp. 525.000.000,00 Terealisasi Sebesar Rp. 229.674.600,00. Jumlah Realisasi Keuangan Kegiatan Tahun 2023 : Rp. 40.704.164.284,00 dengan persentase capaian sebesar 84.6 %, sedangkan Realisasi Fisik kegiatan sebesar 93,5 %. Pelaksanaan program / kegiatan di tahun anggaran 2023, diukur dari pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan.

Realisasi dan Persentase Pelaksanaan Program Kerja Perangkat Daerah

Tabel
Pengukuran Kinerja Berdasarkan Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2023.

Nama Sasaran	Nama Indikator	Satuan	Volume	Capaian Fisik
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	Persen	3.50	3.71
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Persentase Sentra IKM Berbasis Hilirisasi Produk Pertanian Dalam Arti Luas Yang Aktif	Persen	100.00	50.00
Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Persen	3.50	3.84
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	42.52	42.52
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Indeks Kepuasan Layanan Perdagangan	Persen	77.00	71.79
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Pertumbuhan Nilai Ekspor Bersih Non Migas dan Batu Bara	Persen	2.00	447.41
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Metrologi Pertumbuhan Usaha	Nilai	65.00	74.77
Meningkatnya kualitas layanan perdagangan	Perdagangan yang Menggunakan e- commerce /marketplace	Persen	20.00	16.00
Meningkatnya	Temuan Hasil			

Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100.00	100.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	14.00	11.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan	Persen	100.00	100.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100.00	100.00
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022 Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100.00	95.15
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100.00	100.00
	Jumlah Inovasi	Jumlah	1.00	1.00

Pemenuhan Target Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan	Rupiah	437,000,000.00	804,422,560.00
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100.00	100.00
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100.00	100.00

Evaluasi untuk program Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan belum mencapai target yang telah direncanakan. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pagu anggaran yang direncanakan adalah sebesar **Rp. 48.098.053.858,00** dan dapat terlaksana sebesar **Rp. . 40.704.164.284,00** capaian kinerja terhadap program dan kegiatan tercapai 93,5%.

Adapun kendala-kendala yang mempengaruhi kurang maksimalnya pelaksanaan program tersebut adalah :

1. Masih lemahnya SDM yang ada
2. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya alam daerah yang ada.
3. Belum terciptanya iklim usaha yang baik di daerah
4. Adanya kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak adanya kelengkapan usulan berupa proposal untuk pelaksanaan kegiatan bantuan alat kepada masyarakat.

TABEL T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2025
Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara**

NO	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d. Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Realisasi Realisasi Capaian Target Program/ Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja PD Tahun (2023)	Realisasi Renja PD tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7)	11=(10/4)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	85	75	87.00 Nilai	77.20 Nilai			87	1.02
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6 Dok	6 Dok			6	
4	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			6 Dok	6 Dok	100		6	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			4 Laporan	4 Laporan	100		4	

6	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			1 Laporan	1 Laporan	100		1	
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	5	1 laporan	1 Laporan	1 Laporan	100		2	0.40
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		124 org/bln	124 org/bln	124 org/bln	100		248	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100		2	
I.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
11	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 unit	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
I.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	5	5 Dokumen	5 dok	8 dok	100		10	2.00
13	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75 org	1 paket	1 paket	100		76	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		6 org	1 Dok	1 Dok	100		7	

15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		15 org	15 org	15 org	100		30	
I.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	40	8 layanan	8 layanan	8 layanan	100		16	0.40
16	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 bln	1 paket	1 paket	100		13	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan		85 jenis	1 paket	1 paket	100	Satu paket tidak dilaksanakan karena stok opname masih banyak	86	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2 paket	2 paket	2 paket	100		4	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		16 jenis cetakan	2 paket	2 paket	100		18	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		4.5 eks	2 eks	2 eks	100		6.5	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100 o/h	100 laporan	100 laporan	100		200	

22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		4 jenis	1 dok	1 dok	100		5	
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 aplikasi			100		1	
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		4 jenis	12 bulan	12 bulan	100		16	
24	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	16	1 unit	2 unit	2 unit	100		3	
25	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		1 unit truk sampah	2 unit truk sampah	2 unit truk sampah	100		3	
2660	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor		6 jenis			100		6	
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung kantor		3 jenis	6 unit	6 unit	100		9	
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	60	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100		24	0.40
28	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		750 lbr	1 laporan	1 laporan	100		751	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		4 rek/bln	1 laporan	1 laporan	100		5	

30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2	laporan	2	laporan	2	laporan	100	4	
I.8	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	6,800	8800	unit	8800	unit	8800	unit	100	17600	2.59
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		40	unit	40	unit	40	unit	100	80	
32	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		13	unit	13	unit	13	unit	100	26	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		5	unit	5	unit	5	unit	100	10	
34	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15	unit	15	unit	15	unit	100	30	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		15	unit	15	unit	15	unit	100	30	
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100	100	100	100	100	100	100	100	200	2.00

II.9	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	289	60	60	60	60	100	120	0.42
35	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				61 dokumen	61 dokumen	100	61	
36	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	256	60	60			100	60	0.23
37	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		18	18	29 dokumen	29 dokumen	100	47	
II.10	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	21					100	0	0.00
38	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				11 dokumen	11 dokumen	100	11	

39	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	15				100		0	0.00
40	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri			3 dokumen	3 dokumen	100		3	#DIV/0!
II.11	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86	43	43		100		43	0.50
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	19	3.33	3.33		100		3.33	0.18
		Indeks Kualitas Pasar	67	48	48		100		48	0.72
41	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	20	6	unit	6	unit	100	12	0.60
42	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		2	unit	8	unit	100	10	
43	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	unit	1	unit	100	2	

44	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5	5 unit	5 unit	5 unit	100		10	2.00
45	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100		4	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		3	
III	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu	4	3.72	3.72		100		3.72	0.93
		Persentase kinerja realisasi pupuk	98	97.86	97.86		100		97.86	1.00
III.12	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya	65	13 jenis			100		13	0.20
47	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	

48	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1	laporan	1	laporan	1	laporan	100		2	
49	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		1	laporan	1	laporan	1	laporan	100		2	
III.13	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	65	41.67	41.67					100		41.67	0.64
50	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	laporan	1	laporan	1	1 laporan laporan	100		2	
51	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan		1	laporan	1	laporan	1	laporan	100		2	

52	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
III.14	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	443	80 ton	80000 ton	80 ton	100		80080	180.88
53	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan		18 dokumen	18 dokumen	18 dokumen	100		36	
54	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
53	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%		1 laporan	1 laporan	1 laporan	100		2	
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100	20 20	20 pelaku usaha	20 pelaku usaha	100		40	0.40
IV.15	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	5	1 mou	1 Mou	1 Mou	100		2	0.40

54	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina		15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	15 pelaku usaha	100		30	
55	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang		6 pelaku usaha	6 pelaku usaha	6 pelaku usaha	100		12	
56	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal		8 pelaku usaha	8 pelaku usaha	8 pelaku usaha	100		16	
57	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	3 pelaku usaha	100		6	
58	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi		10 produk	10 produk	10 produk	100		20	
59	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina		40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	40 pelaku usaha	100		80	
V	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	31	26.25			100		26.25	0.85
V.16	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	95	17.99			100		17.99	0.19

60	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		1500 unit	1283 unit	1.283 unit	100		2783	
61	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		816 orang	816 orang	816 orang	100		1632	
VI	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	99	95.24					95.24	0.96
VI.17	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	90	50			100		50	0.56
62	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		20 UMKM	20 UMKM	20 UMKM	100		40	
63	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi		25 UMKM	25 UMKM	25 UMKM	100		50	
64	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100		2	
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	8	2 Dokumen					2	0.25

VII.18	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	3	1	sentra			100		1	0.33
65	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2
66	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2
67	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2
68	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	2
VIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri	100							0	0.00
VIII.19	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	98,25	79.04	79.04			100		79.04	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		0.02	0.02			100		0.02	

		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		0.02	0.02			100	0.02	
69	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Facilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
70	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota		1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100
IX	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dalam SIINAS	24,95	2.9	2.9				2.9	

IX.20	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	221	33 unit usaha			100		33	0.15
71	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	
72	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	
73	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		1 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100		2	

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan yaitu merumuskan kebijakan teknis bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara selalu proaktif dan kreatif dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai inovator dan motivator.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai dinas teknis yang baru terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil dalam upaya mencari dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Indikator yang digunakan untuk mengukur dukungan kinerja layanan publik adalah :

1. Penyelesaian masalah pengaduan konsumen
2. Pertumbuhan omzet industri kecil rumah tangga berbasis komoditas pertanian
3. Pertumbuhan omzet IKM berbasis komoditas pertanian , dan
4. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi.

Sedangkan dalam pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan melaksanakan pelayanan sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

TABEL T.C-30

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Kutai Kartanegara

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah		Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	2.3	3.5	3.7	4.1	2.3	3.71	3.7	4.1	4.1	4.8	
			Pertumbuhan Pelaku Usaha Sektor Industri Pengolahan Non migas	2.4	3.5	3.8	4.3	2.4	3.84	3.8	4.3	4.3	4.7	
			Persentase Sentra IKM berbasis Hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	100	100	100	100	100	50	100	100	100	100	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan		Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai impor)	2	2	2	2	2	447.41	2	2	2	2	

			Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/ marketplace	20	20	20	20	20	16.00	20	20	20	20	
			Indeks Kualitas Layanan Perdagangan (Pasar)Prasarana Pengembangan Wilayah (%)	75	77	82	87	75	71.79	82	87	87	92	
			Persentase Pelaku Usaha Yang Memperoleh Ijin Sesuai dengan Ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	30.28	42.52	55.84	69.87	30.28	42.52	55.84	69.87	69.87	84.25	
			Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan metrologi	NA	65	75	80	65	74.77	75	80	80	85	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

Permasalahan dan Solusi di Bidang Industri

Pembangunan Industri terutama industri kecil dan menengah dalam pembangunan struktur ekonomi negara-negara sedang berkembang sangat penting dan hal ini telah dibuktikan bahwa peranan industri kecil menengah mampu menjadi tiang penggerak perekonomian akibat badai krisis yang menimpa negeri ini. Barangkali yang perlu menjadi catatan dan perhatian semua pihak adalah daya tahan beberapa industri unggulan yang menjadi tiang penyangga ekonomi mengalami kemunduran akibat ketidak mapuan menghadapi persaingan yang semakin tinggi dalam pasar global. Oleh karenanya upaya pembinaan dan pengembangan terhadap industri terus dilakukan. Pemberdayaan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara juga mengembang misi bagi pembinaan dan pengembangan industri dari tahun ke tahun telah mampu memberikan nilai tambah positif terhadap pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui upaya-upaya peningkatan usaha industri, sehingga dampaknya tentu berujung pada efek pengganda yang cukup signifikan terhadap kesejahteraan pengusaha/pengrajin khususnya dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya.

Upaya-upaya yang telah dilakukan dengan berbagai kegiatan yang di dukung oleh berbeagai program telah dioptimalkan, namun dengan adanya berbagai faktor pembatas maka dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan industri masih terdapat beberapa permasalahan, sehingga pembiaan dan pengembangan industri tersebut belum bisa mencapai sasaran yang optimal, antara lain disebabkan oleh :

- Tidak tentunya lokasi kegiatan pameran atau acara Dekranasda lainnya sedangkan didalam RKA sudah tercantum lokasi tetapi event/kegiatan Dekranasda dilakukan di Provinsi lainnya
- Masih banyak produk IKM yang belum bisa memasarkan usahanya masuk ke toko modern/supermarket
- Banyak aturan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dengan pihak toko modern agar produk mereka bisa dipasarkan
- Mahalnya biaya sewa tempat untuk outlet di Bandara APT. Pranoto Samarinda mengakibatkan kegiatan tidak bisa dilaksanakan

- Banyaknya kegiatan pameran dengan membawa pelaku usaha dan kita harus mendahulukan dananya sangat sulit untuk dilaksanakan
- Belum keluarnya dana kita mengikuti event pameran memakai dana belum terealisasi sudah dituntut lagi untuk melaksanakan event pameran Masih banyaknya IKM yang belum paham tentang bahaya menggunakan bahan tambahan berbahaya
- Masih banyak IKM yang belum memiliki ijin atau sertifikasi
- SPD kegiatan belum terbit/keluar

Upaya Yang Dilakukan (Solusi) Dalam rangka pengembangan industri di Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (PIKM) di Kabupaten Kutai Kartanegara, telah memberikan solusi yang terkait berbagai kegiatan yang ditunjang dari dana APBD (Desentralisasi), antara lain :

- Di dalam RKA untuk kegiatan promosi tidak mencantumkan lokasi pameran sehingga apabila ada event/kegiatan di lokasi yang lain bisa kita ikuti.
- Dilakukannya pertemuan atau koordinasi antara pelaku usaha dengan toko modern/supermarket
- Mengurangi persyaratan dan masalah pembayaran produk IKM yang sudah laku terjual bisa dibayarkan dengan cepat karena mereka perlu modal untuk melanjutkan usahanya
- Diupayakan untuk sewa tempat Outlet bandara APT. Pranoto bisa di jangkau sehingga pelaku usaha bisa memasarkan produknya.
- Perlunya dana talangan untuk mengikuti event pameran sehingga kita bisa mempromosikan produk unggulan Kab Kukar.
- Dilakukannya pembinaan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya
- Dilakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha (IKM)
- Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
- Agar kegiatan berjalan dengan lancar maka diperlukan koordinasi dan SPD dapat terbit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan

Permasalahan dan Solusi di Bidang Perdagangan

Permasalahan :

- Lokasi pasar tradisional yang berjauhan
- Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
- Kurang lengkapnya alat uji standar yang dimiliki UPT Meterologi Legal
- Tingkat kesadaran pemilik alat yang masih kurang untuk membawa alatnya untuk ditera/tera ulang
- Susahnya bekerjasama dengan distributor untuk memfasilitasi barang untuk kegiatan operasi pasar tersebut
- Lokasi tempat pelaksanaan operasi pasar yang jarak tempuhnya jauh dan pelaksanaannya yang harus ke Desa-Desa

- Lambatnya tanggapan dari pihak Kecamatan tentang penunjukan Tim Monitoring Kecamatan
- Instansi terkait yang memiliki data kurang kooperatif dalam memberikan data
- Transport untuk pengangkutan material cukup mahal dan cuaca tidak menentu
- Adanya penolakan dari masyarakat desa terhadap lokasi yang dijadikan tempat dibangunnya pasar ternyata lahan tersebut diperuntukkan untuk oembangunan masjid
- Aktifitas pedagang mingguan dan cuaca yang tidak menentu
- Adanya penolakan dari para pedagang yang berada di luar area pasar gerbang raja
- Adanya aktivitas pasar setiap hari dan cuaca yang tidak menentu.
- Kurang tersedianya SDM Pengelola Administrasi kegiatan yang memiliki kompetensi :
 1. Administrasi Keuangan Daerah
 2. Tenaga Penganalisa
- Jumlah komoditi jagung yang diminta oleh calon mitra usaha sangat banyak dan harga yang diminta pengepul tidak sesuai (harga rendah), sehingga belum ada kesepakatan antara petani jagung dengan calon mitra usaha.
- Menunggu selesainya pembuatan aplikasi oleh pihak ketiga
- Menunggu proses anggaran perubahan dilakukan baru bisa dilaksanakan kegiatan

Solusi :

- Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
- Perlu diadakan sosialisasi tentang tera dan tera ulang alat UTTP agar pemilik alat menyadari pentingnya untuk menera alat mereka sesuai dengan akurasi setiap alat ukur sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan
- Perlunya pemahaman dan pengertian dari agen-agen atau distributor untuk bekerjasama dalam kegiatan operasi pasar barang kebutuhan pokok - Adanya kepastian tentang penyediaan dana dari kegiatan tersebut
- Melalui koordinasi baik surat menyurat atau ke lapangan, instansi atau perusahaan terkait
- Mencari transport yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan
- Kepala desa harus menyediakan lahan untuk pembangunan pasar yang sudah memiliki legalitas dan diperuntukkannya harus jelas untuk pembangunan pasar
- Lokasi pembangunan pasar bebas dari aktifitas perdagangan
- Dibuatkannya pintu masuk dan keluar di area pafar
- Lokasi pasar harus bersih dari aktifitas pasar dan dipagar , dan untuk sementara pedagang direlokasi di tempat lain
- Kegiatan diusulkan di hapus
- Bertambahnya SDM/tenaga kerja
- Administrasi Keuangan Daerah
- Tenaga Penganalisa
- Peningkatan produksi jagung
- Peningkatan kualitas jagung.
- Terus dilakukan fasilitasi komunikasi kemitraan.

- Dilaksanakan sesuai SPK kontrak pihak ketiga.
- Dilaksanakan secara terus menerus agar target tetap tercapai

2.4. Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 pada tahap pembangunan ke-IV ditahun 2025. tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah “PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN”

Dalam dokumen RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026 sebagai penerjemahan dari Visi dan Misi KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA IDAMAN Dinas Perindustrian dan perdagangan berupaya untuk mendukung target Pemerintah daerah yang menetapkan hingga tahun 2026 pembangunan 3 (tiga) pengolahan hasil pertanian dalam arti luas dimana komoditi agro industri yang akan dikembangkan yaitu :

1. Pengolahan Rumput Laut;
2. Pakan Ternak/Ikan;
3. Karet; dan
4. Minyak Sawit.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara berperan dalam peningkatan kapasitas , pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Selain berdasarkan tema pembangunan tahun 2025, porsi Kegiatan diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing industri pengolahan komoditas unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara yang terarah, gradual dan berkelanjutan.

Tabel T.C-31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000,-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					23.280.034.769					36.513.886.792	
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 80,00	23.280.034.769	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai 80,00	36.513.886.792	
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	575.123.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	6 Dokumen	1.250.000.000	
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	0 dokumen	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik	1 dokumen	50.000.000	

			Sektoral Daerah Kepmen 050 5889					Sektoral Daerah Kepmen 050 5889			
3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 data	500.000.000	
3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan N Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Berita acara	-	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan N Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 berita acara	50.000.000	

3.31.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	267.623.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	450.000.000	
3.31.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	157.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	50.000.000	
3.31.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 laporan	150.000.000	
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1 Laporan	13.863.027.507	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel	1 Laporan	15.363.240.339	

3.31.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 orang/bln	13.697.903.907	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 orang/bln	14.877.516.739	
3.31.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 laporan	-	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	25.000.000	
3.31.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	165.123.600	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 laporan	435.723.600	
3.31.01. 2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0 dokumen	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050	1 dokumen	25.000.000	

			Kepmen 050 5889					5889			
3.31.01. 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	135.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah		Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	150.000.000	
3.31.01. 2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	135.000.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 laporan	50.000.000	
3.31.01. 2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	0 laporan	-	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	1 laporan	100.000.000	
3.31.01. 2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 dokumen	-	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2 dokumen	20.000.000	

3.31.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	0 laporan	-	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 laporan	10.000.000	
3.31.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 dokumen	-	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 dokumen	10.000.000	
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	337.500.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen administrasi kepegawaian	1 Dokumen	423.000.000	
3.31.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	200.000.000	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	200.000.000	
3.31.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	67.500.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	11 orang	153.000.000	
3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	15 orang	70.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-	15 orang	70.000.000	

			Peraturan Perundang- Undangan					Undangan			
3.31.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8 Layanan	1.524.625.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah	8 Layanan	2.857.613.000	
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	75.000.000	
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	140.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.070.113.000	Peralatan kantor penunjang aplikasi SRIKANDI, kearsipan dan penatausahaan Keuangan serta administrasi 10 unit, Scanner 3 unit, Printer 3 unit, Layar Interaktif 3 unit, Lap

											top 2 unit
3.31.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n	2 pake t	237.000.00 0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 pake t	150.000.000	
3.31.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediaka n	1 pake t	75.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengganda an	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan	1 pake t	75.000.000	
3.31.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediaka n	1 dok ume n	10.125.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan yang Disediakan	1 dok ume n	75.000.000	
3.31.01. 2.06.09	Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 lapo ran	800.000.00 0	Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Laporan Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 lapo ran	650.000.000	

3.31.01. 2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	112.500.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	262.500.000	Untuk Record center (perlu pembenahan untuk peningkatan penilaian arsip)
3.31.01. 2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	75.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen	500.000.000	Team Creator untuk mendesain pemasaran dan promosi, kemudian diperlukan untuk pengembangan medsos (IG dan FB) dan website SIHABOK yang akan kami hidupkan kembali dalam rangka pelaksanaan promosi pemasaran

3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pengadaan	730.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis Pengadaan	2.180.750.000	
3.31.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 unit	-	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 unit	1.260.000.000	pembelian 4 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari thn 2010 yang lalu
3.31.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Truk Sampah;	550.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit Truk Sampah;	630.750.000	Penambahan pagu ditambahkan dari sub kegiatan lain, dalam rangka penyesuaian belanja dengan nilai pagu pada e-katalog

3.31.01. 2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Paket Mebel yang Disediaka n	0 unit	-	Pengadaan Mebel	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 unit	200.000.000	
3.31.01. 2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	5 unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 unit	-	
3.31.01. 2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukun g Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediaka n	3 unit	90.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	90.000.000	
3.31.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Jumlah waktu penyediaa n jasa penunjang urusan pemerinta han daerah yang disediaka n	12 Bula n	4.895.209. 052	Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah an daerah yang disediakan	12 Bula n	12.299.733.743	

3.31.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.024.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 laporan	2.024.000	
3.31.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	3.063.308.450	
3.31.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	4.243.185.052	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 laporan	9.234.401.293	Penambahan pagu pemenuhan tenaga kebersihan Outsourcing pasar Mangku rawang dan Tangga Arung/Lapangan Pemuda 4.080.474.612, Penyediaan jasa keamanan pasar Pasar Mangku rawang dan Tangga

											Arung 2.910.8 23.255, Jasa pengelol aan parkir pasar 100.000 .000
3.31.01. 2.09	Pemeliharaa n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah		Jumlah barang milik daerah	145 unit 0	1.119.549. 710	Pemelihar aan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah		Jumlah barang milik daerah	145 unit 0	1.969.549.710	
3.31.01. 2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perindu strian dan Perdaga ngan	Jumlah Kendaraan Peroranga n Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarka n Pajaknya	40 unit	141.233.10 0	Penyediaan Jasa Pemelihara an, Biaya Pemelihara an, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Perin dustri an dan Perda ganga n	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	40 unit	141.233.100	

3.31.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	378.316.610	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit	378.316.610	
3.31.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2 unit	1.250.000.000	Rehab Gedung Kantor Perindustrian dan Perdagangan Jln. Imam Bonjol 500.000 .000,00, Pembangunan outlet IKM dan sekretariat at Dekransda 200.000 .000,00, Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/ Kantor Pengelola, 200.000 .000,00, Rehab ruangan

											kerja 350.000 .000,00
3.31.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100.000.000	
3.31.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 unit	100.000.000	

3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 Persen	370.000.000	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan	100 Persen	205.000.000	
3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	76 dokumen	85.000.000	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan		Jumlah dokumen rekomendasi izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan	76 dokumen	85.000.000	
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	85.000.000	

3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitka n per tahun	64	Sura t TDG	100.000.00 0	Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun	64	Sura t TDG	35.000.000	
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dok ume n	100.000.00 0	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	18 Kec	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	dok ume n	35.000.000	Perenca naan Pemban gunan Kawasa n perguda ngan untuk mengata si inflasi pada zona hulu.
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftar an Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitka n	15	dok ume n	85.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftara n Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftara n Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan	15	dok ume n	85.000.000	

3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	85.000.000	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	1 dokumen	85.000.000	
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	4 dokumen	100.000.000	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri		Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan	4 dokumen	-	

3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 dok ume n	100.000.00 0	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri		Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	1 dok ume n	-	
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	75,0 0 pers en	6.680.000. 000	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	75, 00 pers en	17.155.000.000	
			Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,22 pers en				Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)	4,2 2 pers en		
			Indeks Kualitas Pasar	62,0 0 nilai				Indeks Kualitas Pasar	62, 00 nilai		
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4,00 unit	6.255.000. 000	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	4,0 0 unit	16.555.000.000	

3 30 03 2,01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Separi Kec Tenggar ong Sebera ng, Pasar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kot a Bangun , Pasar Desa Segihan Kecama tan Sebulu, Pasar Desa Peranga t Baru Kecama tan Marang Kayu, Pasar Desa Rantau Hempa ng Kecama tan Muara Kaman, Pasar Desa Badak Baru Kecama tan Muara badak, Revitali sasi	Jumlah Sarana Distribusi Perdagang an	7 unit	6.055.000.0 00	Penyediaan Sarana Distribusi Perdaganga n	Pasar Desa Separ i Kec Tengg arong Seber ang, Pasar Desa Kota Bang un Ulu Kec.K ota Bang un, Pasar Desa Segih an Keca mata n Sebul u, Pasar Desa Peran gat Baru Keca mata n Mara ng Kayu, Pasar Desa Ranta u Hemp ang Keca mata n Muar a	Jumlah Sarana Distribusi Perdaganga n	7 unit	14.355.000.000	Revitalisas i pasar mangkura wang 2 dalam rangka percepata n operasion al pasar
--------------------	---	---	---	--------	-------------------	---	--	---	--------	----------------	--

		Pasar Mangkurawang					Kaman, Pasar Desa Badak Baru Kcamatan Muarabadak, Revitalisasi Pasar Mangkurawang				
3 30 03 2,01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	200.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkurawang)	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1 unit	2.200.000.000	
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00 unit UPP	425.000.000	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan	5,00 unit UPP	600.000.000	

3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Sambaja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggaring.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dok umen	275.000.00 0	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Sambaja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggaring.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 dok umen	600.000.000	
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Sambaja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggaring.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dok umen	150.000.00 0	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Sambaja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggaring.	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1 dok umen	-	
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,57 Persen	1.355.000.000	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Koefisien variasi harga antar waktu	3,57 Persen	2.595.000.000	
			Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,39 Persen				Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi	98,39 Persen		
3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin	13 Jenis	405.000.00 0	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah		Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaan	13 Jenis	300.000.000	

	Kabupaten/ Kota		ketersedia annya			Kabupaten / Kota		nya			
3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisa si Ketersedia an Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	135.000.00 0	Koordinasi dan Sinkronisa si Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaa n Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	100.000.000	
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisa si Peningkata n Aksesibilit as Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	135.000.00 0	Koordinasi dan Sinkronisa si Peningkata n Aksesibilita s Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	100.000.000	

3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	135.000.00 0	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1 lapo ran	100.000.000	
3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	66,6 7 Pers en	545.000.00 0	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota		Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya	66,6 7 Pers en	2.075.000.000	
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten	1 lapo ran	135.000.00 0	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 lapo ran	250.000.000	

			/Kota								
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantau an Harga dan Stok Barang Kebutuha n Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegra si dalam Sistem Informasi Perdagang an	1 lapo ran	135.000.00 0	Pemantaua n Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdaganga n	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdaganga n	1 lapo ran	50.000.000	
3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksana an Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampa k dalam 1 (Satu) Kabupaten /Kota	1 lapo ran	275.000.00 0	Pelaksanaa n Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten /Kota	20 Kec	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	1 lapo ran	1.775.000.000	Penamb ahan pagu pelaksa naan Operasi Pasar Barang Kebutuh an Pokok dalam rangka pencapa ian target pelaksa naan di 20

											Kecamat an.
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurka n	86.8 19 Ton	405.000.00 0	Pengawasa n Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	86. 819 Ton	220.000.000	
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkap an Legalitas Dokumen Perizinan	1 dok ume n	135.000.00 0	Pemeriksaa n Kelengkap an Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Kelengkap an Legalitas Dokumen Perizinan	1 dok ume n	50.000.000	
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasa n Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 lapo ran	135.000.00 0	Pengawasa n Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	1 lapo ran	35.000.000	
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasa n Penyalura n dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi	1 lapo ran	135.000.00 0	Pengawasa n Penyaluran dan Pengguna an Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1 lapo ran	135.000.000	

			Minimal 90%								
3 30 05	PROGRAM PENGEMBA NGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00 Persen	1.510.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan	100,00 Persen	1.420.000.000	
3 30 05 2,01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1 MoU	1.510.000.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten /Kota		Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor	1 MoU	1.420.000.000	
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/ Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kecamatan Janggu t, Muara	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 Pelaku Usaha	-	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten /Kota	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak , Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	40 Pelaku Usaha	-	

		Kaman					Jang ut, Muar a Kama n				
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Jakarta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7 Pela ku Usa ha	485.000.00 0	Pameran Dagang Nasional	Jakar ta	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	7 Pela ku Usa ha	775.000.000	Hasil mapping penyesu aian nomenkl atur baru
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggar ong, Kec. Sanga- Sanga, Kota Samboj a,Kota Muara Badak	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pela ku Usa ha	235.000.00 0	Pameran Dagang Lokal	Kec. Tengg arong , Kec. Sanga - Sanga , Kota Samb oja,Ko ta Muar a Bada k	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	10 Pela ku Usa ha	235.000.000	
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Suraba ya, Yogyak arta, Banjar masin dan Makasa r	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pela ku Usa ha	460.000.00 0	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Surab aya, Yogya karta, Banja rmasi n dan Maka sar	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	5 Pela ku Usa ha	235.000.000	
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun	6 Prod uk	330.000.00 0	Peningkata n Citra Produk Ekspor	Kab. Kukar	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi	6 Prod uk	175.000.000	Hasil mapping penyesu aian nomenkl atur baru

			Menjadi Materi Promosi					Materi Promosi			
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 Pelaku Usaha	-	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Kab Kukar	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	4 Pelaku Usaha	-	Drop kegiatan hasil mapping
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	30,00 Persen	485.000.000	PROGRAM STANDAR DISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga	30,00 Persen	985.000.000	
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	19,41 Persen	485.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	19,41 Persen	985.000.000	
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.750 unit	310.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	18 Kecamatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1.750 unit	810.000.000	Pembelian peralatan tera tera ulang alat UTTP dalam rangka peningkatan pelaksanaan tera tera

											ulang alat UTTP.
3 30 06 2,01 02	Pengawasan /Penyuluhan Metrologi Legal	18 Kecama tan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 oran g	175.000.00 0	Pengawasa n/Penyulu han Metrologi Legal	18 Keca mata n	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100 oran g	175.000.000	
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAA N DAN PEMASARA N PRODUK DALAM NEGERI		Persentas e Produk dalam negeri yang dipasarka n di pasar rakyat dan di toko modern	98,8 1 pers en	610.000.00 0	PROGRAM PENGGUN AAN DAN PEMASAR AN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	98, 81 pers en	685.000.000	
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Persentas e realisasi promosi	80 pers en	610.000.00 0	Pelaksana an Promosi, Pemasaran dan Peningkat an Penggunaa n Produk Dalam Negeri		Persentase realisasi promosi	80 pers en	685.000.000	
3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksana kan Promosi Penggunaa n Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten	15 UMK M	175.000.00 0	Pelaksanaa n Promosi Penggunaa n Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten /Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melaksanak an Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	15 UMK M	250.000.000	

			/ Kota								
3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMK M	435.000.000	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	Kab Kukar	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	50 UMK M	435.000.000	Penambahan pagu hasil mapping nomenklatur baru
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	-	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	1 dokumen	-	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00 dokumen	20.110.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	1,00 dokumen	26.865.000.000	

3 31 02 2,01	Penyusunan , Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangu n Industri Kabupaten/ Kota		Jumlah dokumen perencana an dan jumlah sentra	1,00 Sent ra IKM	20.110.000 .000	Penyusuna n, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangu nan Industri Kabupaten /Kota		Jumlah dokumen perencanaa n dan jumlah sentra	1,0 0 Sent ra IKM	26.865.000.000	
3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan pelaksana an Pembangu nan Sumber Daya Industri	1 dok ume n	600.000.00 0	Koordinasi, Sinkronisa si, dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan pelaksanaan Pembangun an Sumber Daya Industri	1 dok ume n	600.000.000	
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembanguna n Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri	1 dok ume n	18.245.000. 000	Koordinasi, Sinkronisa si, dan Pelaksanaa n Pembangu nan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pembangun an Sarana dan Prasarana Industri	1 dok ume n	25.000.000.000	Penamb ahan pagu dalam rangka pencapa ian program dedikasi pemban gunan sentra IKM Pakan Ikan serta pembeli an peralata n sentra IKM.

3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaa n Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi , Sinkronisa si, dan Pelaksana an Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyaraka t	2 dok ume n	1.065.000.0 00	Koordinasi, Sinkronisa si, dan Pelaksanaa n Pemberday aan Industri dan Peran Serta Masyaraka t	Kab. Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi , dan Pelaksanaan Pemberdaya an Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 dok ume n	1.065.000.000	
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembanguna n Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksana an Rencana Pembangu nan Industri	1 dok ume n	200.000.00 0	Evaluasi terhadap Pelaksanaa n Rencana Pembangu nan Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangun an Industri	1 dok ume n	200.000.000	
3 31 03	PROGRAM PENGENDAL IAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberia n rekomend asi izin usaha industri	100 Pers en	-	PROGRAM PENGEND ALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		Cakupan pemberian rekomenda si izin usaha industri	100 Pers en	-	
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan		Persentas e jumlah hasil pemantau an dan pengawas an dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	88,6 5 Pers en	-	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri		Persentase jumlah hasil pemantaua n dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah	88, 65 Pers en	-	

	Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,06	Persen		(IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah	0,06	Persen		
			Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,06	Persen				Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten	0,06	Persen		

3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	-	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping
--------------------	---	-----------	---	-----------	---	---	-----------	---	-----------	---	-----------------------------

3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembarang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	1 dokumen	-	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten /Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembarang janggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	5,80 Persen	975.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase IKM yang dalam SIINAS	5,80 Persen	790.000.000	

3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	50 IKM	975.000.000	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini	50 IKM	790.000.000	
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	600.000.000	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	415.000.000	
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi	1 dokumen	-	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi	1 dokumen	-	Drop kegiatan hasil mapping

	Kota melalui SIINas		dan Analisis Industri Kabupaten /Kota Melalui SIINas			Kabupaten /Kota melalui SIINas		dan Analisis Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas			
3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	375.000.000	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten /Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/ Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 dokumen	375.000.000	
					55.375.034.769					87.213.886.792	

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam bagian ini di uraikan hasil telaah terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat, assosiasi, SKPD Kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kecamatan dan Kabupaten.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		
	- Pembangunan Pasar	Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Tabang, Kecamatan Kembang Janggut, Kecamatan Muara Muntai, Kecamatan Sebulu dan Kecamatan Marang Kayu	Jumlah pasar yang dibangun	10 unit	
	- Revitalisasi pasar	Kecamatan Kembang Janggut dan Kecamatan sebulu	Jumlah pasar yang di revitalisasi	2 unit	
2.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta				

	Masyarakat				
	- Fasilitas Pelatihan Olahan Pangan dan Sertifikasi Halal bagi IKM	Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Loa Janan, Kecamatan Kota Bangun dan Kecamatan Marang Kayu	Jumlah IKM yang di latih dan difasilitasi Halal	6 IKM	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1.TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah dan prioritas pembangunan nasional merupakan hal yang sangat penting dalam menyusun target dengan memperhatikan program nasional, propinsi dan kabupaten. Rencana kerja memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara yang disusun sesuai tugas dan fungsi guna mewujudkan tujuan dan sasaran kerja yang telah ditetapkan.

3.2.TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 telah ditetapkan tujuan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

A. Tujuan

1. Meningkatnya Pengelolaan Pertanian Berbasis Potensi Unggulan Daerah
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Daerah.
3. Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif.
4. Meningkatnya Daya Saing Investasi Daerah.

B. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai antara lain :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah.
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Perdagangan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Tabel 3.1.
Target Indikator Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
TUJUAN Meningkatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan.		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori industri pengolahan	%	6,97
Meningkatkan akses dan tata kelola perdagangan besar dan eceran		LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi) kategori perdagangan besar dan eceran	%	4,50
	SASARAN 1. Meningkatnya Pertumbuhan Industri Kecil Menengah	Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Kecil Menengah Pengolahan Non Migas	%	4,80
		Pertumbuhan pelaku usaha sektor industri pengolahan non migas	%	4,70
		Persentase sentra IKM berbasis hilirisasi produk pertanian dalam arti luas yang aktif	%	100
	2. Meningkatnya layanan perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor bersih non migas dan batu bara (nilai ekspor dikurangi nilai nilai impor)	%	2
		Persentase pelaku usaha yang memperoleh ijin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	84,25
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan metrologi	Nilai	85
		Indeks kualitas layanan perdagangan (pasar)	Nilai	92
		Pertumbuhan usaha perdagangan yang menggunakan e-commerce/marketplace	%	20

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara disusun berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Mendukung pencapaian sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 dengan prioritas Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan yang berfokus pada Peningkatan produktivitas pariwisata berbasis alam, sosial budaya, dan olah raga sehingga sasaran Peningkatan Daya Saing Pariwisata dapat terlaksana;
2. Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih dalam Visi Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia, dengan Misi Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam Rencana Kerja Tahun 2025 ini Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara memperhatikan berbagai Regulasi dan memastikan Sinkronisasi Substansi dan Proses dalam Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana amanat dari Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 05.05.889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah mempunya amat bertanggung jawab dalam menyusun program, yang berpedoman pada kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan, keuangan daerah.

Dalam Melaksanakan target OPD yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2025 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan jumlah Program Sebagai Berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri;
4. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional;
5. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
7. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
8. Program Pengembangan Ekspor;
9. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
10. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri

Tabel T.C-33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		80,00	36.513.886.792			78,00	23.884.610.769
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		6	1.250.000.000			6	575.123.500
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraa n Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	50.000.000	APB D			
3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 data	500.000.000	APB D			

3.31.01.2. 01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu Dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 berita acara	50.000.000	APB D			
3.31.01.2. 01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 dokumen	450.000.000	APB D		1 dokumen	267.623.500
3.31.01.2. 01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 laporan	50.000.000	APB D		5 laporan	157.500.000
3.31.01.2. 01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 laporan	150.000.000	APB D	Penyediaan data melalui aplikasi	1 laporan	150.000.000
3.31.01.2. 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang akuntabel		1 Laporan	15.363.240.339			1 Laporan	14.158.627.507
3.31.01.2. 02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114 orang/bln	14.877.516.739	APB D		124 orang/bln	13.697.903.907

3.31.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	25.000.000	APB D		1 laporan	25.000.000
3.31.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	435.723.600	APB D		1 laporan	435.723.600
3.31.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	25.000.000	APB D		1 dokumen	25.000.000
3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat daerah	Jumlah dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1 Dokumen	150.000.000			1 Dokumen	135.000.000
3.31.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	50.000.000	APB D		1 laporan	135.000.000

3.31.01.2. 03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Kepmen 050 5889	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	100.000.000	APB D		1 laporan	100.000.000
3.31.01.2. 04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	20.000.000	APB D		2 dokumen	20.000.000
3.31.01.2. 04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	10.000.000	APB D		1 dokumen	10.000.000
3.31.01.2. 04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 dokumen	10.000.000	APB D		1 dokumen	10.000.000
3.31.01.2. 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian		1 Dokumen	423.000.000			1 Dokumen	337.500.000
3.31.01.2. 05.02	Pengadaan Pakaian dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	200.000.000	APB D		1 paket	200.000.000
3.31.01.2. 05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6 orang	153.000.000	APB D		6 orang	67.500.000

3.31.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15 orang	70.000.000	APB D		15 orang	70.000.000
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum perangkat daerah		8 Layanan	2.857.613.000			8 Layanan	1.574.625.000
3.31.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	75.000.000	APB D		1 paket	75.000.000
3.31.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 paket	1.070.113.000	APB D	Peralatan kantor penunjang aplikasi SRIKANDI, kearsipan dan penatausahaan Keuangan serta administrasi 10 unit, Scanner 3 unit, Printer 3 unit, Layar Interaktif 3 unit, Laptop 2 unit	1 paket	140.000.000

3.31.01.2. 06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 paket	150.000.000	APB D		2 paket	237.000.000
3.31.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 paket	75.000.000	APB D		1 paket	75.000.000
3.31.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 doku men	75.000.000	APB D		doku men	10.125.000
3.31.01.2. 06.09	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150 lapora n	650.000.000	APB D		lapora n	850.000.000
3.31.01.2. 06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 doku men	262.500.000	APB D	Untuk Record center (perlu pembenah an untuk peningkat an penilaian arsip)	1 doku men	112.500.000

3.31.01.2. 06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 dokumen	500.000.000	APB D	Team Creator untuk mendesain pemasaran dan promosi, kemudian diperlukan untuk pengembangan medsos (IG dan FB) dan website SIHABOK yang akan kami hidupkan kembali dalam rangka pelaksanaan promosi pemasaran	1 dokumen	75.000.000
3.31.01.2. 07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3 Jenis Pengadaan	2.180.750.000			3 Jenis Pengadaan	840.000.000
3.31.01.2. 07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 unit	1.260.000.000	APB D	pembelian 4 unit kendaraan dinas untuk kepala bidang yang sdh pembelian dari thn 2010 yang lalu	0 unit	-

3.31.01.2. 07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 Unit Truk Sampah	630.750.000	APB D	Penambahan pagu diambil dari sub kegiatan lain, keperluan pembelian truk sampah menyesuaikan pagu yang ada di e katalog	1 Unit Truk Sampah;	550.000.000
3.31.01.2. 07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2 unit	200.000.000	APB D		2 unit	200.000.000
3.31.01.2. 07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4 unit	90.000.000	APB D		4 unit	90.000.000
3.31.01.2. 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan		12 Bulan	12.299.733.743			12 Bulan	4.899.185.052
3.31.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1 laporan	2.024.000	APB D		1 laporan	6.000.000
3.31.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3 laporan	3.063.308.450	APB D		1 laporan	650.000.000

3.31.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9 lapora n	9.234.401.29 3	APB D	Penambah an pagu pemenuha n tenaga kebersiha n Outsourci ng pasar Mangkura wang dan Tangga Arung/La pangan Pemuda 4.080.474 .612, Penyediaa n jasa keamanan pasar Pasar Mangkura wang dan Tangga Arung 2.910.823 .255, Jasa pengelolaa n parkir pasar 100.000.0 00	2 lapora n	4.243.185.052
3.31.01.2. 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah		1450 unit	1.969.549.7 10			135 unit 0	1.219.549.710

3.31.01.2. 09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40 unit	141.233.100	APB D		40 unit	141.233.100
3.31.01.2. 09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13 unit	378.316.610	APB D		13 unit	378.316.610
3.31.01.2. 09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8 unit	1.250.000.000	APB D	Rehab Gedung Kantor Perindustrian dan Perdagangan Jln. Imam Bonjol 500.000.000,00, Pembangunan outlet IKM dan sekretariat Dekranas da 200.000.000,00, Pemeliharaan Rutin Gedung Kantor/Kantor Pengelola, 200.000.0	5 unit	500.000.000

							00,00, Rehab ruangan kerja 350.000.0 00,00		
3.31.01.2. 09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan	1 unit	100.000.000	APB D		1 unit	100.000.000
3.31.01.2. 09.11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabil itasi	Dinas Perindust rian dan Perdagan gan	1 unit	100.000.000	APB D		1 unit	100.000.000
3 30 02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Cakupan Rekomendasi Perijinan dan Pendaftaran Perusahaan		100 Perse n	205.000.000			68 Perse n	500.000.000

3 30 02 2.01	Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin toko swalayan	Jumlah dokumen rekomendasi ijin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan yang diterbitkan		76 doku men	85.000.000			68 doku men	100.000.000
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik	Kab Kukar	1 doku men	85.000.000			80 doku men	100.000.000
3 30 02 2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) yang diterbitkan per tahun		64 Surat TDG	35.000.000			52 Surat TDG	100.000.000
3 30 02 2.02 01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	18 Kec	1 doku men	35.000.000	APB D		52 doku men	100.000.000
3 30 02 2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang diterbitkan		15 doku men	85.000.000			11 doku men	150.000.000

3 30 02 2.03 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri terintegrasi secara elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik		1 dokumen	85.000.000			17 dokumen	150.000.000
3 30 02 2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba Lanjutan dari waralaba luar negeri yang diterbitkan		4 dokumen	-			3 dokumen	150.000.000
3 30 02 2.04 01	Fasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik luar negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri		- dokumen	-			4 dokumen	150.000.000
3 30 03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola		75,00 persen	17.155.000.000			65,00 persen	21.616.024.000
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar (Retribusi)		4,22 persen				3,62 persen	

		Indeks Kualitas Pasar		62,00 nilai				48,00 nilai	
3 30 03 2,01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola		4,00 unit	16.555.000. 000			5,0 0 unit	21.116.024.000
3 30 03 2,01 01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Desa Separi Kec Tenggaro ng Seberang, Pasar Desa Kota Bangun Ulu Kec.Kota Bangun, Pasar Desa Segihan Kecamata n Sebulu, Pasar Desa Perangat Baru Kecamata n Marang Kayu, Pasar Desa Kelekat Kecamata n Kembang Janggut, Pasar Desa Badak Baru Kecamata n Muara badak,	8 unit	14.355.000.0 00	APB D		2 unit	20.916.024.000

		Revitalisasi Pasar Mangkurawang, perbaikan turap pasar Mangkurawang 2, Pasar Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman					
--	--	--	--	--	--	--	--

3 30 03 2,01 02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Gerbang Raja (Mangkura awang)	4 unit	2.200.000.00 0	APB D	Dalam rangka mengako modir kebersiha n dan security, kemudian taman pasar, perencana an IPAL pada pasar mangiraw ang 1, revitalisas i IPAL pada pasar Mangkura wang 2 , Radio land (kelengka pan dan peralatan nya), lampu pasar	1 unit	200.000.000
3 30 03 2,02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan		5,00 unit UPP	600.000.000			5,00 0 unit UPP	500.000.000

3 30 03 2,02 01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	3 dokumen	600.000.000	APB D	Penguatan Peran UPTD, terhadap sosialisasi kebijakan manajemen pasar, pengelolaan data pedagang, retribusi, kelayakan saran dan prasarana dan pengelolaan aplikasi manajemen pasar.	2 dokumen	300.000.000
3 30 03 2,02 02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pasar Wonotirto Kec. Samboja, Pasar Mangkurawang Kec. Tenggarong.	0 dokumen	-	APB D	Penyusunan kajian pasar terkait kelayakan pembangunan pasar di seluruh kecamatan mengacu pada RTRW dan RPJPD	1 dokumen	200.000.000
3 30 04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Koefisien variasi harga antar waktu		3,57 Perse	2.595.000.000			3,62 Perse	1.500.000.000
		Persentase pupuk bersubsidi yang diawasi		98,39 Perse				98,21 Perse	

3 30 04 2,01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijamin ketersediaannya		13 Jenis	300.000.000			13 Jenis	450.000.000
3 30 04 2,01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100.000.000	APB D		1 laporan	150.000.000
3 30 04 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100.000.000	APB D	772.523.000	1 laporan	150.000.000
3 30 04 2,01 03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kab. Kukar	1 laporan	100.000.000	APB D		1 laporan	150.000.000

3 30 04 2,02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah barang kebutuhan pokok dan Barang Penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya		66,67 Perse n	2.075.000.000			58,33 Perse n	600.000.000
3 30 04 2,02 01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kab. Kukar	1 lapora n	250.000.000	APB D		1 lapora n	150.000.000
3 30 04 2,02 02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Kab. Kukar	1 lapora n	50.000.000	APB D		1 lapora n	150.000.000
3 30 04 2,02 03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	20 Kec	20 lapora n	1.775.000.000	APB D	Pelaksana an Operasi Pasar Barang Kebutuha n Pokok di 20 Kecamata n dalam rangka penangan	1 lapora n	300.000.000

							an inflasi		
3 30 04 2,03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan		86.819 Ton	220.000.000			84.546 Ton	450.000.000
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	1 dokumen	50.000.000	APB D		18 dokumen	150.000.000
3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	1 laporan	35.000.000	APB D		1 laporan	150.000.000
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kukar	1 laporan	135.000.000	APB D		1 laporan	150.000.000
3 30 05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase pertumbuhan ekspor produk unggulan		100,00 Persen	1.420.000.000			100,00 Persen	1.000.000.000

3 30 05 2,01	Penyelenggara an Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah MoU Perdagangan Produk unggulan ekspor		1 MoU	1.420.000.000			1 MoU	1.000.000.000
3 30 05 2,01 01	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina	Kec. Marang Kayu, Kec. Muara badak, Kembang Janggut, Muara Kaman	40 Pelaku Usaha	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatan ya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	15 Pelaku Usaha	300.000.000
3 30 05 2,01 02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Jakarta	7 Pelaku Usaha	775.000.000	APB D	Mengako modir penambah an target output pelaku usaha dan lokasi pelaksana an kegiatan.	6 Pelaku Usaha	300.000.000
3 30 05 2,01 03	Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Kec. Tenggaro ng, Kec. Sanga- Sanga, Kota Samboja,	10 Pelaku Usaha	235.000.000	APB D		8 Pelaku Usaha	250.000.000

			Kota Muara Badak						
3 30 05 2,01 04	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Surabaya, Yogyakarta, Banjarmasin dan Makasar	3 Pelaku Usaha	235.000.000	APB D		3 Pelaku Usaha	250.000.000
3 30 05 2,01 05	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Kab. Kukar	6 Produk	175.000.000	APB D		10 Produk	200.000.000
3 30 05 2,01 06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	Kab Kukar	4 Pelaku Usaha	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatanPameran dagang nasional	40 Pelaku Usaha	250.000.000
3 30 06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga		30,00 Persen	985.000.000			28,25 Persen	550.000.000
3 30 06 2,01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku		19,41 Persen	985.000.000			19,06 Persen	550.000.000

3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18 Kecamatan	1.751 unit	810.000.000	APB D	Pembelian peralatan tera tera ulang alat UTPP dalam rangka peningkatan pelaksanaan tera yang akan mempengaruhi pencapaian target nilai IKK pada LPPD	1.500 unit	350.000.000
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	18 Kecamatan	1000 orang	175.000.000	APB D		1000 orang	200.000.000
3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern		98,81 persen	685.000.000			98,56 persen	650.000.000
3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi		80 persen	685.000.000			70 persen	650.000.000

3 30 07 2,01 01	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Kab Kukar	100 UMKM	250.000.000	APB D		UMKM	200.000.000
3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Kab Kukar	50 UMKM	435.000.000	APB D	Program Dedikasi Bupati "Program Usaha Kecil Idaman"	20 UMKM	450.000.000
3 30 07 2,01 03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Kaltim	1 dokumen	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor	1 dokumen	200.000.000
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri		1,00 dokumen	26.865.000.000			2,00 dokumen	3.950.000.000
3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra		1,00 Sentra IKM	26.865.000.000			1,00 Sentra IKM	3.950.000.000

	ta								
3 31 02 2,01 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab Kukar	1 doku men	600.000.000	APB D	Program Dedikasi Bupati "Program Hilirisasi Produk Pertanian "	1 doku men	-
3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab Kukar	1 doku men	25.000.000.0 00	APB D	Diperlukan penambah an pagu dalam rangka penyelesai an pabrik minyak makan merah terintegra si berbahan baku kelapa sawit dan peralatan.	1 doku men	1.950.000.000
3 31 02 2,01 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Kukar	2 doku men	1.065.000.00 0	APB D		2 doku men	1.800.000.000

3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	1 dokumen	200.000.000	APB D		4 dokumen	200.000.000
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri		100 Persen	-			100 Persen	400.000.000
3 31 03 2,01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah		88,65 Persen	-			88,65 Persen	400.000.000
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		0,06 Persen				0,06 Persen	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di wilayah Kabupaten		0,06 Persen				0,06 Persen	

3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab Kukar	1 dokumen	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	10 dokumen	150.000.000
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggarang seberang, Kec. Kembangjanggut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loajan dan Kec. Anggana	1 dokumen	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	20 dokumen	250.000.000
3 31 04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase IKM yang dalam SIINAS		5,80 Persen	790.000.000			4,64 Persen	525.000.000

3 31 04 2,01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan informasi industri secara lengkap dan terkini		50 IKM	790.000.000			44 IKM	525.000.000
3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	3 dokumen	415.000.000	APB D		1 dokumen	275.000.000
3 31 04 2,01 02	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kab Kukar	1 dokumen	-	APB D	Tidak tersedia sub kegiatannya pada SIPD RI, di mapping ke sub kegiatan lain	1 dokumen	250.000.000

3 31 04 2,01 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kot a dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Kab Kukar	2 doku men	375.000.000	APB D		1 doku men	250.000.000
		Jumlah			87.213.886.792				54.575.634.769

TABEL SUB. KEGIATAN PROGRAM DEDIKASI BUPATI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Program Dedikasi	Kode	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan OPD	Indikator Outcome/ Output	Satuan	Realisasi				Target						Target Akhir	
					2022		2023		2024		2025		2026			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
Program Usaha Kecil Idaman	3 30 07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	Persen	95,24		97,60		98,56		98,81		99,04		99,04	
	3 30 07 2,01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase realisasi promosi	persen	50		60		70		80		90		90	
	3 30 07 2,01 02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek	IKM	20	400.000.000										
			Jumlah dokumen identifikasi data IKM yang memasarkan secara online	dokumen	1											
			Jumlah pendampingan terhadap IKM agar dapat mengakses pemasaran secara online	IKM	16											
			Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace,	UMKM				50	425.000.000	60	430.000.000	25	435.000.000	25	450.000.000	160
	3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan unit sentra pengembangan industri	dokumen	2		2		2		2		1		3	
	3 31 02 2,01	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan jumlah sentra	sentra IKM	1		-		-		1		1		3	
Program Hilirisasi Produk Pertanian	3 31 02 2,01 04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah pembangunan sentra IKM	unit	1	20.100.000.000										
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	dokumen			1	1.200.000.000	1	48.000.000.000	1	18.245.000.000	1	1.950.000.000	5	69.395.000.000

TABEL
Sub. Kegiatan Penunjang Indikator Kinerja Kunci

OPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana	Keterangan IKK
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3 30 02 2.01 01	Fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab Kukar	1 dokum en	85,000,000		Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS /SIUP Toko Swalayan)
3 30 04 2,03 01	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Kab. Kukar	1 dokum en	50,000,000	APBD	Persentase kinerja realisasi pupuk

3 30 04 2,03 02	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kab. Kukar	1 laporan	35,000,000	APBD	
3 30 04 2,03 03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Kab. Kukar	1 laporan	135,000,000	APBD	
3 30 06 2,01 01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	18 Kecamata n	unit 1,75 1	810,000,000	APBD	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
3 30 06 2,01 02	Pengawasan/Penyul uhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	18 Kecamata n	100 orang 0	175,000,000	APBD	
3 31 02 2,01 06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kab Kukar	1 dokum en	200,000,000	APBD	Pertambah an jumlah industri kecil dan menengah di Kab/Kota

3 31 03 2,01 01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha MenengahTinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Kab Kukar	1 dokumen	-	APBD	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP
3 31 03 2,01 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota	Kec. Tenggarong, Kec. Tenggaroang seberang, Kec. Kembangjambut, Kec. Muara Jawa, Kec. Loa Janan dan Kec. Anggana	1 dokumen	-	APBD	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

3 31 04 2,01 01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kab Kukar	3 dokumen	415,000,000	APBD	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini
		Jumlah			1,905,000,000		

BAB V.

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Rencana Kerja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

5.1. CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN, BAIK DALAM RANGKA PELAKSANAANNYA MAUPUN SEANDAINYA KETERSEDIAAN ANGGARAN TIDAK SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 antara lain :

- a. Perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta indikatornya pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara
- b. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026, namun dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 perludilakukan penyesuaian, terutama terkait indikator sub kegiatan. Selanjutnya penyesuaian ini akan diakomodir pada saat dilakukannya penyusunan terhadap Renstra Tahun 2025-2029
- c. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sebagai komitmen untuk pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah, serta menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

5.2. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan menjamin terlaksananya program, kegiatan dan sub kegiatan untuk pencapaian tujuan, sasaran dan target perangkat daerah serta pencapaian tujuan serta sasaran pembangunan daerah, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Seluruh aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab dan berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 sesuai tugas dan kewenangannya
- b. Menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan daerah yakni RPJMD dan RKPD dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yakni RENSTRA dan RENJA
- c. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2025
- d. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- e. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kalsifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- f. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

5.3. RENCANA TINDAK LANJUT

Program, kegiatan dan Sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang direncanakan merupakan prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah jangka menengah, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja untuk setiap triwulannya
- b. Dalam hal hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap target dan sasaran kinerja maka dokumen Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku
- c. Perubahan-perubahan tersebut akan dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025
- d. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan.
- e. Seluruh aparatur sipil negara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan pemahaman dan komitmen dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Disperindag Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai dokumen perencanaan tahunan organisasi perangkat daerah.

Tenggarong, 05 Agustus 2024
 Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 Kab. Kutai Kartanegara
 Plt. Kepala

Sayid Fathullah, S.Sos. M.M
 NIP. 19690505 199803 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jalan Jend. Sudirman No. 1 RT. 04 Kelurahan Melayu Telp. (0541) 661158
Website : disperindag.kukarkab.go.id E-mail : disperindag@mail.kukarkab.go.id Kode Pos 75512

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B- 595/DISPERINDAG/Set.II /009.1.1.2/VII/2024

TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), setiap Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rencana Kerja (RENJA) berpedoman pada RPJMD tersebut ;
 - b. bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 64 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
 - c. bahwa berdasarkan maksud tersebut, maka dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Undang-undang Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan ,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tahapan,tata cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang pengelolaan Pasar Tradisional.
12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2025.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, selanjutnya disebut dengan RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, merupakan dokumen perencanaan pembangunan bidang Perindustrian dan Perdagangan periode satu tahun yaitu Tahun 2025 ;

- KEDUA** : Sistematisa penulisan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang disesuaikan dengan pembagian urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 01 Juli 2024.

Plt. Kepala Dinas,

SAYID FATHULLAH, S.Sos, M.M
Pembina Tingkat I
NIP. 19690505 199803 1 010



DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA